

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini merupakan kesimpulan dari penulisan skripsi yang berjudul “*Dinamika Multikulturalisme Kanada (1968-2006)*”. Kesimpulan tersebut merujuk pada jawaban atas permasalahan penelitian yang telah dikemukakan oleh penulis di dalam bab sebelumnya. Dalam bab ini juga akan memuat rekomendasi yang dapat digunakan oleh para pembaca.

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang penulis dapatkan dari hasil penulisan skripsi yang berjudul “*Dinamika Multikulturalisme Kanada (1968-2006)*” adalah sebagai berikut: **Pertama**, multikulturalisme Kanada terbentuk oleh kehadiran imigran dengan beragam latar belakang etnis dan budaya yang datang dari berbagai belahan dunia melalui tahapan yang berbeda dan tahapan migrasi yang paling substansial adalah tahapan yang terjadi setelah Perang Dunia ke II. Multikulturalisme di Kanada juga tidak terlepas dari peranan pemerintah yang menciptakan konsep multikulturalisme dan menjadikannya kebijakan serta memproklamkan Kanada sebagai negara pertama yang menganut model multikulturalisme sebagai kebijakan nasional. Multikulturalisme Kanada dikatakan berhasil karena mampu melindungi hak-hak warga negaranya sehingga dapat meredam masalah-masalah yang terjadi antara setiap etnis dan menjadi model percontohan bagi negara-negara lain.

Kedua, dalam perkembangannya, multikulturalisme Kanada tidak berjalan tanpa hambatan. Banyak perselisihan yang terjadi dalam masyarakatnya karena memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai multikulturalisme itu sendiri. Bahkan masyarakat dunia terutama dari kalangan liberal egalitarian dan rasionalis menganggap multikulturalisme bertentangan dengan paham liberalisme yang mengabaikan perbedaan budaya dan moral, namun beda halnya dengan liberalisme yang menurut Kymlicka mengajarkan rasa hormat atas kebudayaan dan multikulturalisme memainkan peran vital dalam perkembangan kehidupan.

Ketiga, kebijakan multikulturalisme yang diperkenalkan pada tahun 1971 oleh pemerintah Kanada merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mengakomodasi keragaman masyarakatnya sebagai akibat dari perselisihan antara dua etnis dominan di Kanada, yaitu Inggris dan Perancis. Pada awalnya kebijakan ini hanya menangani perselisihan antara kedua etnis tersebut, namun pada akhirnya kebijakan ini tidak hanya dibuat untuk etnis Inggris dan Perancis, tetapi juga untuk etnis-etnis minoritas lainnya di Kanada. Kebijakan multikulturalisme mengalami beberapa kali modifikasi. Kebijakan Multikulturalisme ditegaskan sebagai prinsip dalam Piagam Hak dan Kebebasan pada tahun 1982, dan dilanjutkan dengan mensahkan Undang-Undang Multikulturalisme pada tahun 1988. Kebijakan ini yang membuat Kanada menjadi negara pertama di dunia yang menegakkan hukum multikulturalisme. Dalam menangani konflik yang terjadi pada masyarakat multikultural, Kanada memiliki hal yang dijadikan sebagai prinsip dasar masyarakatnya yaitu negosiasi dan memberi pengakuan terhadap semua etnis yang ada di Kanada. Dan dampak adanya multikulturalisme bagi

masyarakat Kanada adalah: (a) Diakuinya etnis-etnis minoritas beserta budayanya sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di Kanada. (b) Menumbuhkan sikap saling menghargai dan menghormati antar etnis dan budaya di Kanada. (c) Mendatangkan devisa bagi negara karena banyak orang dari berbagai negara ingin melihat keunikan budaya Kanada. Tak hanya wisatawan, bahkan dengan kemultikulturalannya, Kanada menjadi negara yang diminati pebisnis untuk berinvestasi, dan hal ini akan membantu pemasukan bagi Kanada.

Keempat, dampak adanya multikulturalisme bagi masyarakat dunia adalah para pebisnis dunia akan meningkatkan hubungan dagang dan hubungan diplomatik dengan memanfaatkan komposisi masyarakat yang multikultural. Selain dari prospek perekonomian, Kanada dengan kebijakan multikulturalisme yang diresmikan pada tahun 1971 ini menjadi pionir dan kebijakan ini kemudian diadopsi oleh sebagian besar anggota Uni Eropa sebagai kebijakan resmi dan sebagai konsensus sosial di antara elit politik. Seperti yang telah disebutkan oleh Wiloso dalam artikelnya yang berjudul *Multikulturalisme Dalam Perspektif Antropologi* (2011) menjelaskan bahwa kebijakan multikulturalisme yang dilakukan oleh pemerintah Kanada tersebut dapat dipandang sebagai peristiwa yang sangat fundamental bagi siapapun yang mendambakan terwujudnya cita-cita demokrasi, yang mesti mempertahankan keyakinan bahwa semua warga negara berkedudukan setara

5.2.Rekomendasi

Pertama, untuk lembaga UPI, tulisan ini dapat dijadikan sumber bacaan untuk menambah pengetahuan mengenai multikulturalisme. Untuk Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, nilai-nilai yang terkandung dalam multikulturalisme dapat dijadikan pembelajaran bagi mahasiswa sebagai calon guru Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial khususnya agar membentuk kepribadian setiap mahasiswa hingga lebih dapat memahami realita sosial yang ada di masyarakat. Untuk jurusan Pendidikan Sejarah, tulisan ini dapat memperkaya penulisan dan sumber bacaan mengenai sejarah Amerika pada umumnya dan khususnya mengenai multikulturalisme di Kanada serta dapat mengambil nilai-nilai yang terkandung dalam multikulturalisme ini.

Kedua, untuk sekolah-sekolah, dengan menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam multikulturalisme pada pembelajaran sejarah kontekstual maupun sejarah lokal yang diharapkan mampu menanamkan sikap bertoleransi pada siswa.

Ketiga, kepada seluruh masyarakat, untuk menjaga hubungan antar etnis seperti yang ada di Indonesia, maka kita harus memiliki sikap untuk saling mengerti, saling menghargai, dan saling menghormati antara satu sama lain di setiap aspek kehidupan masyarakat. Dalam menyikapi perbedaan hingga, kita tidak harus menanggapi dengan kekerasan hingga menimbulkan konflik yang lebih besar, kita cukup duduk bersama untuk mencari solusi apa yang sesuai dan berkomitmen penuh atas solusi yang telah disepakati bersama.

Keempat, kepada pemerintah, dalam menangani masalah disintegrasi bangsa, peranan pemerintah sangat menentukan untuk menyelesaikan masalah ini. Ketegasan pemerintah untuk melakukan negosiasi terhadap daerah-daerah yang ingin melepaskan diri karena adanya ketakutan ataupun kecemburuan sosial sangat diperlukan. Jika pemerintah mengabdikan keinginan daerah tersebut untuk keluar dari negara kesatuan maka yang dikhawatirkan adalah munculnya fenomena serupa dimana daerah-daerah lain juga ingin melepaskan diri dari negara. Selain itu, sikap adil terhadap seluruh daerah akan membantu mengurangi masalah yang seperti ini karena setiap etnis yang ada di berbagai daerah di Indonesia akan merasa diakui dalam masyarakat dan mereka memiliki hak yang sama dalam negara tanpa harus dibeda-bedakan.